

**PENGARUH KARAKTERISTIK  
*CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS  
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY***



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANDINA DWI PARAMITA  
NIM. C2C009250**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Andina Dwi Paramita

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009250

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK  
CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAPLUAS PENGUNGKAPAN  
CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY**

Dosen Pembimbing : Marsono, S.E., M. Adv., Acc., Akt.

Semarang, 23 September 2013

Dosen Pembimbing,

(Marsono, S.E., M. Adv., Acc., Akt.)

NIP. 19711225 199903 1003

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Andina Dwi Paramita

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009250

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK  
*CORPORATE GOVERNANCE*  
  
TERHADAPLUAS PENGUNGKAPAN  
*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY***

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 3 Oktober 2013**

Tim Penguji :

1. Marsono, S.E., M. Adv., Acc., Akt. (.....)
2. Agung Juliarto, SE., M.Si., Akt, Ph.D (.....)
3. Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Andina Dwi Paramita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 September 2013

Yang membuat pernyataan,

(Andina Dwi Paramita)  
NIM. C2C009250

## **ABSTRACT**

*The objective of this research was to analyze which characteristics of corporate governance that influence the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosures in the companies which operate in the mining and mining service sector in Indonesia. Corporate governance characteristics which were used, namely size of board of commissioner, independent commissioner, composition of women on board, audit committee, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, government ownership, and public ownership. The extent of CSR disclosure was measured using corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies' annual report. This research also used firm's size and profitability as control variables.*

*The population of this research are companies which operate in the mining and mining service sector that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010 until 2012. Using purposive sampling method, then total sample of this research became 48 annual reports of mining companies. Multiple regression method was used to analyze the relationship between corporate governance characteristics and CSR disclosure.*

*The results show that composition of women on board and managerial ownership has a significant effect toward the extent of CSR. The results also show that both of control variables have significant effects on the extent of CSR.*

*Keywords: corporate social responsibility, corporate governance, board characteristics, audit committee, ownership structure.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *corporate governance* apa saja yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik. Luas pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan *corporate social disclosure index* (CSDI) berdasarkan *item* standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diungkapkan di dalam *annual report* perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka total sampel penelitian adalah 48 *annual report*. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan CSR.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Kata kunci: *corporate social responsibility, corporate governance, board characteristics*, komite audit, struktur kepemilikan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pujisyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.si., Ph.D., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Marsono, S.E., M.Adv., Acc., Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran, dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dosen Waliyang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Umi dan Abah, terima kasih untuk semua cinta, perhatian, motivasi, serta doa yang tiada henti agar penulis selalu dilimpahkan keberuntungan dan kemudahan. Semoga penulis dapat segera menjadi anak yang mandiri, selalu dapat memberikan yang terbaik serta menjadi anak yang berbakti.
7. Kakakku tersayang, Meutia Kharisma Lestari, yang telah menjadi kakak terbaik sekaligus sahabat terbaik untuk berbagi segala hal, baik suka maupun duka. Semoga apa yang selama ini kita inginkan dapat segera tercapai.
8. Rheza Arista, terima kasih banyak atas segala kesabaran, perhatian, kasih sayang, bantuan, dan dukungan yang tiada henti dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu sebagai tempat curhat dan selalu bisa mengerti bagaimanapun keadaan penulis serta bersedia membantu dalam segala hal.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Riri, Chikyen, Nandy atas persahabatan, segala kesenangan, perhatian, kesabaran, dukungan, saran, pelajaran hidup dan pengalamanyang sangat berharga bagi penulis. Semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya.

10. Teman-teman Retro SMA 5 yang selalu menghibur dan memberikan motivasi pada penulis.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2009: Ingrid, Nita, Fanie, Tia, Riris, Okta, Ririn. Terima kasih atas persahabatan, kekeluargaan dan bantuannya selama di bangku kuliah. Sukses untuk kita semua.
12. Teman seperjuangan bimbingan, Veli, Mega, dan terutama Mbak Dian. Terima kasih atas bantuannya yang membuat penulis menjadi semakin termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Tim I Periode 2012 Desa Pantianom: Rimce, Mimin, Icong, Atiq. Terima kasih atas semua pengalaman baik sebelum, saat dan setelah KKN. Semuanya sangat berarti untuk penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semarang, September 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	13
2.1.2 Teori Legitimasi.....	16
2.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	17
2.1.4 Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	18
2.1.5 <i>Corporate Governance</i> .....	20
2.1.6 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	21
2.1.7 Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran .....	31

2.4 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.4.1 Karakteristik <i>Corporate Governance</i> dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR.....	33
2.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	33
2.4.1.2 Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	35
2.4.1.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR.....	36
2.4.1.4 Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	39
2.4.1.5 Konsentrasi Kepemilikan dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	40
2.4.1.6 Kepemilikan Manajerial dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	42
2.4.1.7 Kepemilikan Asing dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	44
2.4.1.8 Kepemilikan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	46
2.4.1.9 Kepemilikan Publik dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	47
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 49
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	49
3.1.1 Variabel Dependen .....	49
3.1.2 Variabel Independen.....	50
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris .....	50
3.1.2.2 Komisaris Independen .....	51
3.1.2.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris .....	51
3.1.2.4 Komite Audit .....	51

3.1.2.5	Konsentrasi Kepemilikan .....	52
3.1.2.6	Kepemilikan Manajerial .....	52
3.1.2.7	Kepemilikan Asing .....	52
3.1.2.8	Kepemilikan Pemerintah .....	53
3.1.2.8	Kepemilikan Publik .....	53
3.1.3	Variabel Kontrol .....	53
3.1.3.1	Ukuran Perusahaan .....	53
3.1.3.2	Profitabilitas .....	54
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	54
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	55
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	55
3.5	Metode Analisis Data .....	56
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	56
3.5.2.1	Uji Normalitas .....	56
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas .....	57
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	58
3.5.3	Analisis Regresi .....	58
3.5.4	Pengujian Hipotesis .....	60
3.5.4.1	Uji F ( <i>F test</i> ) .....	61
3.5.4.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	61
3.5.4.3	Uji Regresi Parsial (Uji <i>t</i> ).....	62
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	63
4.1	Gambaran Umum Perusahaan Sampel .....	63
4.2	Analisis Data .....	64
4.2.1	Statistik Deskriptif .....	64
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	67
4.2.2.1	Uji Normalitas .....	67
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas .....	70
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	71
4.2.3	Pengujian Hipotesis .....	73

4.2.3.1	Hasil Uji F .....	73
4.2.3.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	74
4.2.3.3	Persamaan Regresi.....	77
4.2.3.4	Pengujian Hipotesis Pertama (H1) .....	79
4.2.3.5	Pengujian Hipotesis Kedua (H2) .....	79
4.2.3.6	Pengujian Hipotesis Ketiga (H3).....	80
4.2.3.7	Pengujian Hipotesis Keempat (H4).....	80
4.2.3.8	Pengujian Hipotesis Kelima (H5).....	80
4.2.3.9	Pengujian Hipotesis Keenam (H6).....	81
4.2.3.10	Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7).....	81
4.2.3.11	Pengujian Hipotesis Kedelapan (H8) .....	81
4.2.3.12	Pengujian Hipotesis Kesembilan (H9) .....	82
4.3	Intepretasi Hasil.....	83
4.3.1	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	83
4.3.2	Pengaruh Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	84
4.3.3	Pengaruh Proporsi Wanita Dalam Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	86
4.3.4	Pengaruh Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	87
4.3.5	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	88
4.3.6	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	89
4.3.7	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	90
4.3.8	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	91
4.3.9	Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan CSR .....	92

BAB V	PENUTUP .....	94
5.1	Simpulan .....	94
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	96
5.3	Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA	.....	97

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	..28
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian .....	..63
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	..64
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	..69
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	..70
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser.....	..72
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	..74
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1.....	..75
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2.....	..76
Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi .....	77
Tabel 4.11 Ringkasan Pengujian Hipotesis.....	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	68
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot .....	69
Gambar 4.3 Scatterplot.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 12

Lampiran B : Daftar Perusahaan Sampel

Lampiran C : Daftar Kategori Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Dengan adanya perusahaan, roda perekonomian negara dapat berputar. Perusahaan menyediakan lapangan kerja, pengangguran menjadi menurun, kemudian Produk Domestik Bruto meningkat. Di sisi lain, perusahaan yang hidup di lingkungan sosial, dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan telah mengakibatkan munculnya berbagai masalah lingkungan seperti krisis ekologi, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan pada kelangkaan, hingga berujung kepada isu yang menuntut perhatian khusus warga dunia, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global (Kompas, 20 Juni 2012). Lingkar Studi CSR mengutip buku Robert Emmet Hernan (2010) dan Matthew J. Kiernan (2009) bahwa sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan. Adapun 75% masalah sosial dan lingkungan juga disebabkan oleh perusahaan.

Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stockholders* dan *bondholders*, yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Berbagai kritik muncul dikarenakan akuntansi konvensional dianggap tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas (Rahmawani, 2010). Secara tradisional, akuntabilitas keuangan memang merupakan wewenang akuntan, tetapi

dalam beberapa tahun saat ini, akademisi akuntansi menjadi pelopor dalam penelitian akuntansi sosial dan lingkungan. Upaya tersebut memperluas pemikiran mengenai peran akuntansi (Lehman, 1999). Hal ini mendorong munculnya konsep akuntansi yang disebut dengan *corporate social responsibility* (selanjutnya disingkat CSR).

Konsep CSR telah ada selama beberapa dekade, namun peningkatan praktik dan aktivitas CSR pada perusahaan baru terjadi selama beberapa tahun terakhir. (Hazlett et al., 2007). CSR menggiring perusahaan yang dulunya hanya berorientasi pada maksimalisasi laba (*profit*), kini menjadi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) serta keseimbangan lingkungan (*planet*). Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai “institusi ekonomi”, tetapi juga sebagai “ekosistem alam” dan “institusi sosial” (Lako, 2011). Oleh karena itu, menurut Ghozali dan Chariri (2007), pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, pengungkapan CSR dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan.

Selama beberapa dekade terakhir, gagasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja lingkungan dan kinerja berkelanjutan telah berakar

dalam wacana CSR (World Bank, 2000; Forstater, 2001; Zadek, 2001; Accountability, 2004; Waddock, 2004; Levy and Kaplan, 2006 dalam Brown *et al.*, 2007). *Voluntary sustainability reporting* kemudian muncul sebagai bagian dari wacana ini dan dengan cepat menyebarkan di perusahaan-perusahaan global (White, 1999; The Economist, 2004; Kolk, 2004 and 2004a; 2005, 2006a; 2006b; Waddock, 2006 dalam Brown *et al.*, 2007). Beberapa organisasi di dunia muncul sebagai pedoman pelaporan CSR, salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI menyediakan kerangka *sustainability reporting* yang komprehensif yang secara luas digunakan di seluruh dunia. Kerangka ini memungkinkan semua organisasi untuk mengukur dan melaporkan ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola kinerja ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). GRI dianggap sebagai bentuk usaha yang paling berhasil dalam hal standarisasi pelaporan informasi sosial dan lingkungan global (Adams dan Frost, 2007).

Di Indonesia, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian dari kalangan perusahaan. Masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melaksanakan *corporate social responsibility* (Daniri, 2008 dalam Nurkhin, 2009). Selain itu, pemerintah selaku regulator memberi perhatian khusus terhadap praktik CSR. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) bagian c menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pasal 74 menguraikan

tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya bagi perseroan yang usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perusahaan terdorong untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Adanya standar yang mengatur praktik pelaporan CSR akan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai *mandatory disclosure*, sehingga pelaporan CSR diharapkan akan lebih lengkap dan akurat.

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007 dalam Mulia, 2010). Menurut Said *et al.* (2009) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan kepada para *stakeholder*. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan apakah sistem pengendalian sudah tepat, khususnya dalam pemantauan risiko, termasuk di dalamnya adalah kewajiban sosial dan lingkungan. Dalam Warsono dkk. (2009) dikatakan bahwa terjadinya berbagai skandal perusahaan besar, seperti Enron dan Parmalat, menguatkan pentingnya

*Corporate Governance* agar perusahaan dapat memerankan diri tidak semata sebagai entitas yang bertujuan meraih kesejahteraan ekonomi tetapi juga sebagai entitas yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk lingkungan alam.

Mekanisme GCG (*Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Waryanto, 2010). Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan struktur *corporate governance* terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan GCG adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu kewajaran (*fairness*), transparansi (*disclosure/transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip-prinsip tersebut ditambah satu lagi, yaitu independensi (*independency*). Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, khususnya dalam prinsip responsibilitas, secara jelas dinyatakan, “Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang terkait antara *corporate governance* dengan *corporate social responsibility*.

Hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan CSR sudah pernah diteliti oleh Said *et al.*(2009), yang penelitiannya dilakukan di Malaysia dengan menggunakan pengertian pengungkapan CSR oleh Hackston dan Milne (1996). Pengungkapan sosial dapat diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan interaksi antara perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosialnya, yang dilaporkan dalam *annual report* atau laporan yang terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut mencakup lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat (Hackston dan Milne, 1996). Penelitian Said *et al.* (2009) menggunakan tujuh karakteristik *corporate governance* yaitu *board size*, *board independence*, *duality*, *audit committee*, *ownership concentration*, *managerial ownership*, *foreign ownership*, dan *government ownership* dengan sampel penelitian seluruh perusahaan *go public* di Malaysia tahun 2006.

Penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan CSR dengan menggunakan enam karakteristik *corporate governance* oleh Said *et al.* (2009) yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, serta ditambah dua karakteristik *corporate governance* yaitu proporsi wanita dalam dewan komisaris dan

kepemilikan publik. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 sebagai populasi penelitian dengan pertimbangan bahwa perusahaan tambang merupakan salah satu perusahaan yang diwajibkan melakukan CSR menurut UU nomor 40 tahun 2007, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, perusahaan di sektor pertambangan berkewajiban melaporkan CSR dan memiliki kontribusi besar dalam perusakan alam maupun kesejahteraan masyarakat (Susanto, 2009). Yuliata (2010) juga berpendapat bahwa perusahaan pertambangan menyerap banyak tenaga kerja dalam proses penambangan maupun produksinya, sehingga kesejahteraan karyawan maupun masyarakat sekitar menjadi penting untuk diungkapkan kepada *stakeholder*. Kemudian penelitian ini menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai indeks pengungkapan CSR dengan pertimbangan bahwa GRI merupakan indeks yang telah digunakan secara internasional.

Keberadaan wanita dalam posisi dewan komisaris dianggap menjadi faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Bernardi dan Threadgill (2010) melakukan penelitian mengenai proporsi wanita dalam *board of director* dan pengaruhnya terhadap *corporate social behavior*. Anggota dewan wanita lebih cenderung menggunakan ukuran kinerja non finansial, seperti inovasi dan tanggung jawab sosial dalam mengevaluasi perusahaan dibanding anggota dewan yang beranggotakan laki-laki. Carter *et al.* (2003) dalam Khan (2010) juga berpendapat bahwa *board diversity* dapat meningkatkan independensi dewan

dengan alasan bahwa perbedaan jenis kelamin, etnis, atau latar belakang budaya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan muncul dari anggota dengan latar belakang yang lebih tradisional.

Sementara itu, Khan *et al.* (2012) beranggapan bahwa kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan milik publik lebih mendapat tekanan untuk menyajikan informasi tambahan dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dari sejumlah besar para pemangku kepentingan. Tuntutan tersebut mengharuskan adanya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sehingga mendorong terwujudnya pengungkapan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Said *et al.* (2009), terdapat variabel *CEO duality*, variabel ini merupakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. *CEO duality* yang dimaksud adalah jabatan rangkap yang dipegang oleh satu orang, yaitu sebagai CEO dan sebagai *chairman*. Posisi *chairman* hanya ada pada model *one-tier board* yang condong pada model *corporate governance* yang terdapat di negara-negara Anglo-Saxon. Penelitian yang dilakukan oleh Said *et al.* (2009) dilakukan di Malaysia, dimana Malaysia merupakan negara persemakmuran Inggris, menggunakan *one-tier board system*. Di sisi lain, Indonesia menggunakan *two-tier board system* yang terdiri dari dua dewan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas, dan dewan direksi yang bertugas sebagai eksekutif dalam perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Implementasi GCG dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*, karena adanya salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility*, yang penekanannya diberikan kepada kepentingan *stakeholder* perusahaan. Prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham dan kreditur, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya. Praktik pengungkapan *corporate social responsibility* memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak bagi sekitarnya, baik itu sosial maupun lingkungannya. Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Keberadaan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pedoman umum GCG Indonesia seharusnya dapat meregulasi perusahaan dalam penerapan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu masih belum menunjukkan hasil yang konsisten tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap CSR, seperti penelitian oleh Khan *et al.* (2012), Khan (2010), Akhtaruddin *et al.* (2009), dan Said *et al.* (2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
5. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
8. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
9. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, independensi komite audit, konsentrasi

kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian diharapkan dapat:

1. Memberikan pemahaman mengenai karakteristik *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam penerapan *good corporate governance*.
3. Bagi badan pembuat standar dan pemerintah selaku regulator, seperti Bapepam, IAI, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan sebagainya, sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat isi dari skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Telaah Pustaka. Bab ini menguraikan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan sistematika pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan

hubungan antar variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang deskripsi operasional yang terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum sampel dan analisis data, serta beberapa pengujian yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan antara lain uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Bab V, Penutup. Bab ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota dalam suatu perusahaan. Teori agensi menyediakan premis teoritis untuk memahami proses organisasional dan desain dari perspektif *principal-agent* (Subramaniam, 2006). Hubungan *agency* adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Yang dimaksud *principal* adalah pemegang saham/*shareholder* dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan *principal-agent* adalah adanya pemisahan antara kepemilikan di pihak *shareholder* dan pengendalian di pihak manajemen.

Eisenhardt (1989) dalam Setiawan (2007), menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan menghindari resiko (*risk aversion*). Asumsi

keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan (Eisenhardt, 1989 dalam Setiawan, 2007).

Keberadaan hak pengendalian residual (*residual control right*) yang diberikan pemegang saham/investor kepada manajer dalam rangka pengelolaan dana investor, memungkinkan terjadinya penyelewengan penggunaan hak tersebut dan akan menimbulkan masalah keagenan, karena *residual control right* diberikan kepada manajer untuk menghadapi berbagai faktor kontijensi yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dalam pembuatan kontrak. Masalah yang timbul dalam penyelewengan penggunaan hak residual tersebut adalah *agent* mungkin tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga memicu timbulnya masalah keagenan atau konflik keagenan yang merupakan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Konflik keagenan muncul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, kinerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*, atau yang disebut asimetri informasi (Oktaviandri, 2008). Karena adanya asimetri informasi yang berujung pada timbulnya konflik keagenan, maka *principal* berusaha untuk memonitor aktivitas *agent*. *Principal* mengeluarkan biaya keagenan (*agency cost*) untuk mengurangi konflik keagenan. *Agency cost*

adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* yang berasal dari biaya pengawasan terhadap *agent* (*monitoring cost*), biaya kontrak, dan visibilitas politis.

Keberadaan *agency cost* berjalan seiring dengan adanya asimetri informasi. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara pemilik dan manajemen, karena dianggap sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi (Healy dan Palepu, 1993 dalam Mahdiyah, 2008). Menurut Matoussi dan Chakroun (2008), *voluntary disclosure* dapat mengurangi asimetri informasi, karena apabila terjadi asimetri informasi maka *agent* bisa mengambil keuntungan dari informasi yang lebih mudah diakses oleh mereka sendiri. *Shareholders* berupaya mendorong adanya pengungkapan, dimana dengan adanya pengungkapan akan membuat *shareholders* mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mengevaluasi manajemen dan juga untuk mengurangi *agency cost* yang dikeluarkan *shareholders*.

*Corporate governance* menyediakan kerangka untuk pengendalian internal yang dapat mengurangi *agency problem*. *Corporate governance* dianggap mampu untuk mengurangi masalah keagenan karena dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer, asimetri informasi, dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri akan dapat dikurangi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan (Ho dan Wong, 2001 dalam Akhtaruddin *et al.*, 2009).

### 2.1.2 Teori Legitimasi

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Definisi legitimasi oleh Lindholm (1994, hal 2) dalam Deegan (2002) adalah sebagai berikut:

“... sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996).

Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya akan mendapat “status” dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Cormier dan Gordon (2001) dalam Inawesnia (2008) yang menyatakan bahwa, teori legitimasi berdasar pada konsep bahwa organisasi memiliki kontrak dengan masyarakat dan memenuhi kontrak tersebut dapat melegitimasi organisasi dan aktivitasnya. Secara jelas, konsep tersebut menganggap bahwa kelangsungan organisasi akan terancam jika

masyarakat menganggap kontrak sosial organisasi dengan masyarakat telah dilanggar.

Ketika manajer merasa bahwa operasi perusahaan tidak sesuai lagi dengan kontrak sosial, maka upaya perbaikan perlu dilakukan agar perusahaan tetap memiliki “kontrak” tersebut, dengan cara mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat. Pengungkapan merupakan cara yang tepat untuk mengubah persepsi dan pandangan-pandangan tersebut. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Mahdiyah, 2008).

### **2.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Mulia, 2010).

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan CSR sebagai:

*“Business’ contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to societal and environmental concerns and value.”*

Definisi di atas menjelaskan CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta perilaku perusahaan (korporat) yang tidak hanya menjamin adanya *return* bagi para pemegang saham, upah bagi para karyawan, produk serta jasa bagi para pelanggan, tetapi perusahaan juga harus memberikan

perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting dan nilai-nilai dalam masyarakat dan lingkungan.

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholders*), tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang (Rosmasita, 2007). Menurut Rosmasita (2007), tujuan CSR adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

#### **2.1.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Hendriksen (1991:203) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang

merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Menurut Guthrie dan Mathews (1985) dalam Hackston dan Milne (1996), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi finansial dan nonfinansial yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi tersebut, yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah. Hal senada juga diungkapkan oleh Sembiring (2003) dimana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Sampai tahun 2012, terdapat lebih dari 11.000 organisasi yang telah menggunakan standar pelaporan GRI untuk *sustainability report* mereka. GRI dibentuk tahun 1997 oleh CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) yang merupakan sebuah organisasi yang memperhatikan *sustainability* dan *climate change* dengan dukungan dari UNEP (*United Nations Environment Programme*).

GRI dalam standar pelaporannya memperhatikan tiga indikator/aspek, yaitu indikator ekonomi/keuangan (*economic performance indicators*), indikator lingkungan (*environment performance indicators*), dan indikator sosial (*social performance indicators*). Indikator sosial terdiri dari empat indikator, yaitu hak

asasi manusia (*human rights performance indicators*), masyarakat (*society performance indicators*), tenaga kerja (*labor performance indicators*), dan pertanggungjawaban produk (*product responsibility performance indicators*).

### **2.1.5 Corporate Governance**

Saat ini banyak lembaga yang mengurus *corporate governance*, dan beragam pula definisi *corporate governance* yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Definisi *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (1999) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Komite Cadbury (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* mengatur elemen-elemen penting perusahaan, elemen-elemen tersebut adalah pembagian tugas agar perusahaan lebih terarah dan terkendali dalam mencapai tujuan, pengaturan hak dan kewajiban dalam mencapai keseimbangan kewenangan, dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengeluarkan Pedoman Umum GCG untuk dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

#### **2.1.6 Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum GCG menyebutkan asas-asas *Good Corporate Governance*, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi (Tranparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **2.1.7 Manfaat *Corporate Governance***

Menurut *The Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, kegunaan dari *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah memperoleh modal.
2. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah.
3. Memperbaiki kinerja usaha.
4. Mempengaruhi harga saham.
5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Nugroho (2008) menyatakan tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil, agar
2. Kompetitif serta mendorong investasi,

3. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, dewan direksi, dan RUPS,
4. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Khan *et al.* (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara *corporate governance* dengan luas pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bangladesh. Khan *et al.* menggunakan *annual report* perusahaan untuk menganalisis pengungkapan CSR. Sampel dalam penelitian ini adalah 116 perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange tahun 2005 sampai 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik, kepemilikan pemerintah, *board independence*, dan keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Khan (2010) meneliti informasi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada 60 bank komersial yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh dan menyelidiki pengaruh potensial elemen *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2010) menggunakan penelitian terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Ernst dan Ernst (1976); Cowen, *et al.* (1987);

Guthrie dan Parker (1989, 1990); Gray, *et al.* (1995)) yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis di Bangladesh, untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh elemen *corporate governance* pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank komersial yang terdapat di Bursa Efek Bangladesh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen dan adanya orang yang berkebangsaan asing dalam dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Said *et al.* (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Said *et al.* menggunakan *annual report* dan *website* perusahaan untuk menganalisis pengungkapan CSR. Tema yang dianalisis adalah lingkungan, komunitas, sumber daya manusia, energi, dan produk. Sampel dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan yang terdaftar di KLSE pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Variabel yang paling berpengaruh adalah kepemilikan pemerintah.

Akhtaruddin *et al.* (2009) meneliti hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan sukarela di Malaysia. Aspek *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan publik, *family*

*control*, dan komite audit. Sampel yang diambil adalah 105 perusahaan dari 6 sektor yang terdaftar di KLSE. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002), Ho dan Wong (2001), dan Ferguson, Lam, dan Lee (2002). Hasil penelitian Akhtaruddin *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ukuran dewan berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela, namun ukuran komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, independensi dewan membuat perusahaan semakin transparan, sedangkan *family control* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, hal ini mengindikasikan apabila perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga (*family*) menjadi kurang transparan dan lebih konservatif dalam menerbitkan informasi.

Puspitasari (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah kepemilikan asing, kepemilikan publik, tipe industri, ukuran industri, dan profitabilitas. Sampel yang diambil adalah 172 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2007. Kesimpulan hasil penelitian Puspitasari (2009) adalah: (1) kepemilikan asing dan kepemilikan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, (2) tipe industri dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan (3) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Machmud dan Djakman (2008) mengadakan penelitian untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan perusahaan dalam pengungkapan CSR pada laporan tahunan 2006. Sampel

penelitian ini terdiri dari 107 perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan kepemilikan institutional juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua struktur kepemilikan tersebut tidak mempunyai perhatian terhadap pengungkapan CSR untuk membuat keputusan investasi.

Huafang dan Jianguo (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap pengungkapan sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina. Sampel penelitian ini 559 perusahaan, perusahaan tersebut yang terdaftar di SSE Cina, namun perusahaan yang bergerka di sektor finansial tidak termasuk di dalam sampel. Pengungkapan sukarela dilihat dari *annual report* perusahaan, dan diukur dengan menggunakan daftar pengungkapan (*disclosure lists*) yang dimodifikasi dari Botosan (1997). Daftar ini terdiri dari 30 *items* yang terdiri dari informasi latar belakang (contoh: tujuan, strategi, dan kompetisi perusahaan), informasi bisnis (contoh: penjualan, produk, dan perkiraan laba), informasi finansial (contoh: rasio-rasio dan tingkat perputaran), dan informasi non-finansial (contoh: pelatihan staf, ISO, dan budaya perusahaan). Kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan *legal-person ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan CEO *duality* dan komposisi dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Wardani (2013)	Regresi Berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel independen: ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan <i>leverage</i> . Variabel dependen: pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	Ukuran dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Khan <i>et al.</i> (2012)	Regresi Berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel Independen: <i>Managerial ownership, public ownership, foreign ownership, board independence, role duality, audit committees</i> . Variabel Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan publik, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit berpengaruh positif signifikan.
Khan (2010)	Regresi berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel independen: <i>Non- executive directors on the board, proportion of women directors on the board, proportion of foreign nationals on the board</i> Variabel Dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Tidak ada hubungan signifikan antara <i>proportion of women directors on the board</i> . Sedangkan <i>proportion of women directors on the board</i> dan <i>proportion of foreign nationals on the board</i> berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Said <i>et al.</i> (2009)	Regresi berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel Independen: <i>Board size, board independence, CEO duality, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.</i> Variabel dependen: <i>CSR Disclosure</i>	Kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Variabel yang paling berpengaruh adalah kepemilikan pemerintah. Proporsi anggota independen pada komite audit akan memperluas pengungkapan CSR.
Akhtaruddin <i>et al.</i> (2009)	<i>OLS regression</i>	Variabel Independen: Ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan publik, <i>family control</i> , dan komite audit. Variabel Dependen: pengungkapan sukarela.	Ukuran dewan berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela, namun ukuran komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, independensi dewan membuat perusahaan semakin transparan, sedangkan <i>family control</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, hal ini mengindikasikan apabila perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga ( <i>family</i> ) menjadi kurang transparan dan lebih konservatif dalam menerbitkan informasi.
Puspitasari (2009)	Regresi berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel Independen: kepemilikan asing, kepemilikan	Kepemilikan asing dan kepemilikan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Tipe

		publik, tipe industri, ukuran industri, dan profitabilitas. Variabel Dependen: pengungkapan CSR.	industri dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Machmud dan Djakman (2008)	Regresi Berganda ( <i>Multiple Regression</i> )	Variabel Independen: Kepemilikan asing, dan kepemilikan institusi. Variabel Dependen: <i>corporate social disclosure index</i> (CSDI).	Kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan kepemilikan institutional juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan asing maupun institutional tidak mempunyai perhatian terhadap pengungkapan CSR untuk membuat keputusan investasi.
Huafang dan Jianguo (2007)	Regresi berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel independen: <i>Blockholder ownership</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, <i>legal-person ownership</i> , CEO duality, dan komisaris independen.  Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. <i>Blockholder owneship</i> , kepemilikan asing, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Sembiring (2005)	Regresi berganda ( <i>multiple regression</i> )	Variabel Independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>industry profile</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> . Variabel Dependen: pengungkapan CSR	Secara simultan, variabel-variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>industry profile</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial, hanya variabel ukuran perusahaan, <i>industry profile</i> , dan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.
------------------	---	--	--

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu, 2013

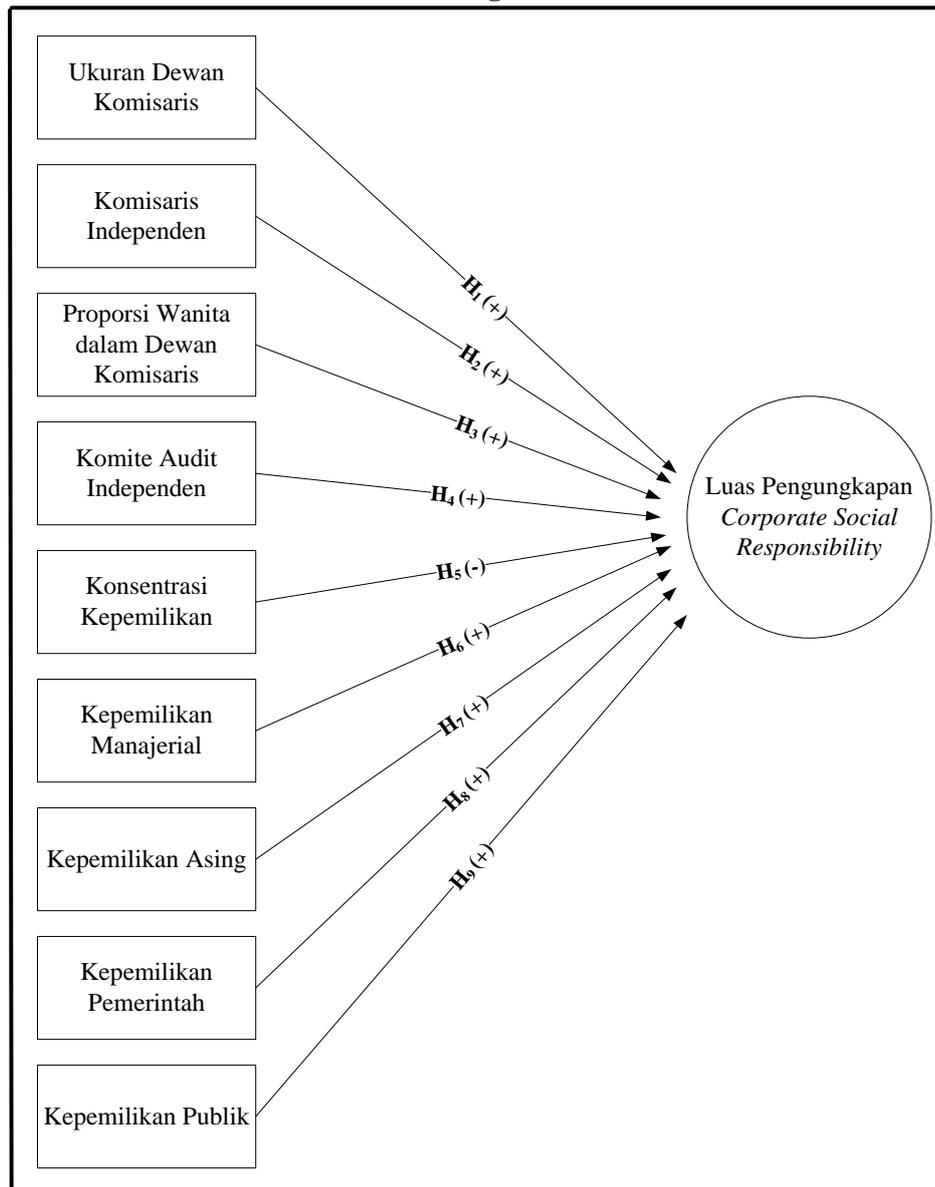
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak terhadap masyarakat tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan salah satu asas *good corporate governance*, yaitu *responsibility*. *Good corporate governance* dan CSR di Indonesia diatur di dalam Pedoman Umum GCG dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR ke dalam *annual report* perusahaan. Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan karakteristik *corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan

kepemilikan publik sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Karakteristik *Corporate Governance* dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

#### **2.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen terpenting dalam mekanisme *corporate governance* yang bertanggungjawab untuk mengawasi aktivitas bisnis yang dijalankan oleh direksi, apakah aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan oleh *agent* dengan baik (Said, 2009). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Namun, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Peraturan mengenai ukuran dewan komisaris tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (5), yang isinya adalah:

“Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.”

Dari berbagai penelitian sebelumnya, terbukti adanya pengaruh ukuran dewan dalam kegiatan perusahaan. Chen dan Jaggi (2000) dalam Akhtaruddin *et al.* (2009) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan, maka akan semakin mengurangi asimetri informasi. Masalah ketidakpastian dan kekurangan informasi juga dapat diminimalisir dengan ukuran dewan yang lebih besar (Bimbaum, 1984

dalam Akhtaruddin *et al.*, 2009). Penelitian oleh Wardani (2013) secara statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2010-2012. Penelitian oleh Akhtaruddin *et al.* (2009), menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan dewan dalam memonitor proses informasi manajemen.

Menurut Akhtaruddin *et al.* (2009), kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi akan lebih meningkat mengikuti penambahan anggota dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR (Putra, 2011).

Dengan demikian hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.2 Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan para pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Literatur empiris tentang *corporate governance* menyatakan bahwa level independensi dewan berhubungan dengan komposisi, dan independensi akan memelihara efektivitas dewan tersebut. Webb (2004) dalam Said *et al.* (2009), menemukan bahwa perusahaan di Eropa yang memperoleh gelar “*socially responsible*” memiliki lebih banyak anggota komisaris independen apabila dibandingkan dengan perusahaan yang “*non-socially responsible*”. Studi oleh Webb ini juga menunjukkan bahwa komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan serta berperan dalam hal monitoring guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan sepatutnya oleh manajemen.

Komisaris independen dipandang sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said *et al.*, 2009), yang nantinya dapat menghasilkan lebih banyak informasi pengungkapan sukarela perusahaan. Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa semakin besar prosentase anggota independen yang ada pada dewan komisaris, akan meningkatkan aktivitas monitoring terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi kepentingan dari kegiatan menutup-nutupi informasi.

Penelitian oleh Wijayanti (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara komposisi komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada 2006 dan 2007, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen, tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

Penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007) dan Akhtaruddin *et al.* (2009) menunjukkan bahwa proporsi *independent non-executive directors* berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Beasley (1996) dalam Akhtaruddin *et al.* (2009) membuktikan bahwa proporsi *non-executive directors* berpengaruh dengan kemampuan dewan untuk mempengaruhi keputusan pengungkapan.

Berdasarkan definisi bahwa komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi yang dianggap dapat mendorong monitoring manajemen dengan lebih baik dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, sehingga hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Literatur empiris mengenai *corporate governance* menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris telah menjadi suatu unsur yang signifikan dalam

susunan *corporate governance* dalam beberapa tahun terakhir (Khan, 2010). Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keragaman dewan komisaris terkait dengan orientasi yang kuat terhadap pelaporan sosial perusahaan dan intensitas kinerja sosial yang lebih tinggi (Ibrahim and Angelidis, 1994; Sicilian, 1996 dalam Khan, 2010). Menurut Campbell dan Minguez Vera (2008) dalam Bernardi dan Threadgill (2010), keragaman dewan komisaris dapat diukur melalui perbedaan gender, umur, etnis, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan keanggotaan dalam suatu organisasi.

Perusahaan dengan kehadiran wanita dalam anggota dewan cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih kuat dibandingkan yang hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali wanita dalam struktur dewan (Rosener, 2003 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010) dan mempedulikan kebutuhan *stakeholder* yang lebih luas dibandingkan dewan komisaris laki-laki (Konrad dan Kramer, 2006 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010). Dewan komisaris wanita juga cenderung lebih menggunakan kinerja non-finansial seperti inovasi dan tanggung jawab sosial untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan dewan laki-laki (Stephenson, 2004 dalam Bernardi dan Threadgill, 2010)

Carter, *et al.* (2003) mendukung adanya keragaman dewan komisaris yang dianggap dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional. Selain itu, Huse dan Solberg (2006) mengilustrasikan bahwa wanita dapat diikutsertakan dalam dewan komisaris melalui pembentukan aliansi,

mempersiapkan dan melibatkan dirinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh dewan komisaris, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi cenderung membuat rapat dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) juga berpendapat bahwa sudah menjadi sifat wanita lebih menstabilkan dibandingkan laki-laki.

Hasil penelitian oleh Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank komersial di Bangladesh. Sedangkan Carter, *et al.* (2003) menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan positif yang signifikan antara keanekaragaman dewan komisaris, yang didefinisikan sebagai persentase wanita, warga Afrika, Amerika, Asia dan Hispanik dalam dewan komisaris; dan nilai perusahaan. Hasil penelitian Bernardi dan Threadgill (2010) juga memberikan bukti bahwa kehadiran wanita dalam anggota dewan memberikan efek yang nyata dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H3: Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.4 Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Komite audit berperan dalam melakukan *review* terhadap proses perusahaan untuk data finansial dan *review* pengendalian internal. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia, keberadaan komite audit merupakan sebuah kewajiban, hal ini tercantum dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG (2006):

“Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengeloladana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.”

Lebih jauh, KNKG (2006) juga menyebutkan tugas dan tanggung jawab dari komite audit:

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
2. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan

anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa komite audit memainkan peran yang efektif dalam meningkatkan standar *corporate governance*. Wright (1996) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa komposisi komite audit berkaitan erat dengan pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (Ho dan Wong, 2001; Bliss dan Balachandran, 2003 dalam Said *et al.*, 2009). Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009), menyatakan bahwa keberadaan komite audit dengan proporsi anggota independen yang lebih besar, dapat mengurangi *agency cost* dan meningkatkan pengendalian internal, yang nantinya akan mengarah pada kualitas pengungkapan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.5 Konsentrasi Kepemilikan (*Ownership Concentration*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Konsentrasi kepemilikan ditunjukkan dari besarnya hak suara (*voting right*) pemegang saham (baik individu maupun institusi) dalam suatu perusahaan (Fan dan Wong, 2000 dalam Aghnia, 2007). Suatu perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila hak suara terbanyak dipegang oleh suatu institusi maupun perorangan. Menurut Ho dan Wong (2001) dalam Matoussi dan Chakroun (2008), ketika

proporsi saham dimiliki oleh segelintir pihak, maka konflik kepentingan yang terjadi bukanlah antara manajer dengan *shareholders*, melainkan antara *large shareholders* dengan *small shareholders*. Pada situasi yang demikian, manajer mendapat insentif untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan *small shareholders* dengan cara mengurangi kualitas pengungkapan. Penelitian terdahulu oleh Chau dan Gray (2002), Cullen dan Christopher (2002), Ullmann (2006) dalam Khan *et al.* (2012) juga menemukan adanya penyebaran kepemilikan antar investor berkontribusi dalam meningkatkan tekanan terhadap *voluntary disclosure*.

Penelitian oleh Halme dan Huse (1997), dalam Said *et al.* (2009) mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *ownership concentration* dan *environmental reporting* dalam *annual report*. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ghazali dan Wheetman (2006), dalam Said *et al.* (2009), menemukan bahwa *ownership concentration* tidak signifikan dalam menjelaskan luasnya pengungkapan sukarela, hasil penelitian ini konsisten dengan Halme dan Huse (1997). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Alsaeed (2006) menemukan bahwa dispersi/penyebaran kepemilikan tidak signifikan dalam menjelaskan variasi pengungkapan sukarela.

Namun penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Chau dan Gray (2002) dalam Said *et al.* (2009) menemukan asosiasi positif antara semakin luasnya kepemilikan dengan luas pengungkapan sukarela. Hal ini didukung oleh Wang dan Coffey (1992) dalam Said *et al.* (2009) yang menemukan bahwa adanya hubungan negatif antara *ownership concentration* dan *philanthropy* (kedermawanan)

perusahaan. Penelitian di Malaysia juga menunjukkan adanya hubungan positif antara penyebaran kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela.

Abdul Samad (2002) dalam Said *et al.* (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi *powerless* untuk mencegah pemegang saham mayoritas dalam penerapan rencana mereka terhadap perusahaan. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Apabila pemegang saham mayoritas beranggapan bahwa pelaksanaan CSR akan mengurangi *return* yang akan mereka peroleh, maka pemegang saham mayoritas dapat memaksa manajemen untuk tidak melaksanakan CSR. Hal ini secara otomatis berakibat pada pengungkapan CSR, sehingga hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H5: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.6 Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Gunarsih (2004) dalam Nugroho (2008) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa masalah *principal-agent* antara *shareholder* dan manajemen muncul ketika manajemen memiliki kepemilikan yang sedikit di dalam perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan dan juga untuk menyelaraskan kepentingan

antara *shareholders* dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Huafang dan Jianguo, 2007). Teori keagenan memprediksi bahwa adanya asosiasi positif antara kepentingan manajemen dengan luas pengungkapan sukarela (Huafang dan Jianguo, 2007).

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross *et al.*, 2004; Listiyono, 2004 dalam Nugroho, 2008). Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen, maka pengungkapan sukarela yang diungkapkan akan semakin luas, hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Warfield (1995) dalam Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan bahwa luasnya kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap jumlah informasi laba yang diungkapkan. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan *image* perusahaan, semakin bagus *image* perusahaan maka harapannya adalah semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dan *return* yang diperoleh pemegang saham yang tidak lain adalah manajemen akan semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian Poolthong dan Mandhachitara (2009) yang menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *brand* perusahaan.

Anggraini (2006) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ pada 2000-2004. Hasil penelitian tersebut adalah perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis

yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain

Berdasarkan asumsi bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* mampu meningkatkan *image* perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan, yang laba itu akan kembali kepada manajemen sendiri sebagai pemilik, maka hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H6: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.7 Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Jika dilihat dari sisi *stakeholder*, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian oleh Amran dan Devi (2008), menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia. Namun penelitian oleh Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Djakman (2008) membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan *corporate social responsibility*. Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said *et al.* (2009), menemukan pengaruh yang signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Malaysia menggunakan pengungkapan CSR sebagai strategi legitimasi proaktif untuk memperoleh arus masuk modal yang berkelanjutan dan untuk memuaskan investor secara etika.

Di Indonesia, penelitian oleh Machmud dan Djakman (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006. Penelitian oleh Puspitasari (2009) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2007.

Berdasarkan asumsi bahwa negara-negara asing memiliki kecenderungan untuk lebih perhatian pada pengungkapan CSR, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah:

**H7: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.8 Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan, mungkin dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

Penelitian Ghazali dan Wheetman (2006) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah tidak signifikan dalam menjelaskan luas pengungkapan sukarela. Namun penelitian oleh Eng dan Mak (2003) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa kepemilikan oleh pemerintah memiliki asosiasi dengan meningkatnya pengungkapan sukarela. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mohd Nasir dan Abdullah (2004), yang lebih jauh menemukan bahwa luasnya kepemilikan oleh pemerintah mempengaruhi jumlah pengungkapan sukarela. Amran dan Devi (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah yang semakin besar akan menghasilkan pengungkapan CSR yang lebih baik.

Berdasarkan asumsi bahwa pemerintah sebagai regulator dan badan kepercayaan masyarakat, maka hipotesis kedelapan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H8: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

#### **2.4.1.9 Kepemilikan Publik (*PublicOwnership*) dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar (Febriantina, 2010). Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) oleh perusahaan. Hal ini karena, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas. Khan *et al.* (2012) menyebutkan bahwa ketika suatu perusahaan mulai *go public*, secara langsung akuntabilitasnya terhadap publik yang merupakan pemegang saham akan sangat diperlukan. Ada penekanan terhadap akuntabilitas akan menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan *visibility* dan *accountability* perusahaan terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Untuk itu diperlukan keterlibatan perusahaan yang lebih dalam kegiatan sosial yang kemudian akan diungkapkan. Hal ini berarti konsentrasi kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas kegiatan sosial

Hasil penelitian Siddiqui (2010) dan Udin dan Choudhury (2008) dalam Khan *et al.* (2012) kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Khan *et al.* (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan asumsi bahwa publik dapat menekan perusahaan agar lebih akuntabel sehingga dapat

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR, maka hipotesis kesembilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H9: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar memperoleh hasil yang akurat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan publik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROA).

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan informasi yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan, menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Said *et al.* (2009) tema yang diungkapkan adalah lingkungan, energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat.

Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR. Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam GRI yang diungkapkan di dalam *annual report*. Tema yang dicakup di dalam GRI adalah lingkungan, ekonomi, HAM, tenaga kerja dan lingkungan kerja, produk, dan masyarakat, dengan total item yaitu sebanyak 79 item (lihat lampiran C). Apabila item informasi tidak ada dalam *annual report* maka diberi skor “0”, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam *annual report* maka diberi skor “1”.

*Disclosure index* digunakan untuk mengetahui seberapa luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Penghitungan indeks yaitu dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item keseluruhan.

$$\text{Disclosure Index} = \frac{\text{Jumlah mandatory item CSR menurut GRI yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item informasi CSR yang diwajibkan}} \quad (3.1)$$

### 3.1.2 Variabel Independen

#### 3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang diangkat, bertugas, dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan} \quad (3.2)$$

### 3.1.2.2 Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris diukur dari prosentase jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}} \quad (3.3)$$

### 3.1.2.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Proporsi wanita dalam dewan komisaris diukur dari prosentase jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, seperti dalam penelitian Khan (2010).

$$\begin{array}{l} \text{Proporsi} \\ \text{Wanita dalam} \\ \text{Dewan} \\ \text{Komisaris} \end{array} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris wanita}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}} \quad (3.4)$$

### 3.1.2.4 Komite Audit

Independensi komite audit diukur dari prosentase jumlah anggota komite audit independen dengan jumlah anggota komite audit, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah seluruh anggota komite audit} \quad (3.5)$$

### 3.1.2.5 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan diukur dengan menggunakan Herfindahl Index (HERF), seperti dalam penelitian Makhija dan Patton (2004) dan Jiang dan Habib (2009). Penghitungan Herfindahl Index (HERF) yaitu jumlah dari kuadrat proporsi kepemilikan pemegang saham terbesar / mayoritas dalam perusahaan, di luar saham yang dimiliki oleh publik. Dalam penelitian ini, perhitungan Herfindahl Index menggunakan lima pemegang saham terbesar.

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan (HERF)} = \sum_{i=1}^n (\text{Kepemilikan Pemegang Saham Mayoritas})^2 \quad (3.6)$$

### 3.1.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen (dalam hal ini dewan komisaris, direksi, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan) dengan jumlah saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.7)$$

### 3.1.2.7 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan jumlah saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.8)$$

### 3.1.2.8 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah saham yang diterbitkan (Said *et al.*, 2009).

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.9)$$

### 3.1.2.9 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh publik dengan jumlah saham yang diterbitkan (Khan *et al.*, 2012).

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.10)$$

## 3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROA). Dengan menggunakan variabel kontrol tersebut, diharapkan akan memperkuat pengaruh antara *corporate governance* dan luas pengungkapan CSR.

### 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan total aset sebagai proksi ukuran perusahaan telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaporan CSR (Hackston dan Milne, 1996; Ho dan Wong, 2001; Eng dan

Mak,2003;Barnea dan Rubins,2004;Gul dan Leung,2004;MohdNasir dan Abdullah,2004;Haniffa dan Cooke,2005;Wilekenset *al.*,2005;Barakoet *al.*,2006;ChengandCourtenay,2006;GhazaliandWheetman,2006; dalam Said *et al.*, 2009). Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset} \quad (3.11)$$

### 3.1.3.2 Profitabilitas

Variabel kontrol selanjutnya adalah profitabilitas. Penggunaan profitabilitas sebagai variabel kontrol telah banyak digunakan oleh para peneliti sebelumnya (Ho dan Wong, 2001; Bliss dan Balachandran, 2003; Eng dan Mak; 2003; Mohd Nasir dan Abdullah, 2004; Shaw Warn, 2004; Haniffa dan Cooke, 2005; Willekens *et. al*, 2005; Barako *et. al*, 2006 dalam seperti Said *et al.* 2009). Profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Equity* (ROA).

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}} \quad (3.12)$$

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian *purposive sampling*, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik (Sekaran, 2008).

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012, karena karena perusahaan sektor pertambangan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang diwajibkan melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* tahun 2010-2012 secara lengkap dan dapat diakses melalui *website* perusahaan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu *annual report* perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode data tiga tahun yaitu 2010-2012. Data berupa *annual report* diperoleh dari Bloomberg dan Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, serta *website* resmi perusahaan masing-masing.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa *annual report* tahun 2010-2012, ICMD, dan studi pustaka atau literatur berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Dengan analisis ini akan dihasilkan rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Sehingga mudah dipahami secara kontekstual oleh pembaca.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, tujuan uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

##### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Asumsi normalitas adalah asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel terdistribusi secara normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2009):

1. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Hal ini perlu dilakukan karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* kurang dari 0.10 atau *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan nilai lebih besar dari 10.

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009):

1. Jika ada pola tertentu pada grafik, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Analisis Regresi

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sbb:

1. Menghitung indeks CSR, yaitu dengan cara membandingkan total item yang diungkapkan perusahaan dalam *annual report* dan *sustainability report* dengan total item yang ditentukan dalam GRI.
2. Menghitung karakteristik *corporate governance* yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.
3. Model Regresi

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan *Software* SPSS Versi 12.00 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan, diukur dengan rumus, sbb:

$$\begin{aligned} \text{CSDI} = & \beta_0 + \beta_1 \text{BDSIZE} + \beta_2 \text{BIND} + \beta_3 \text{COMPWD} + \beta_4 \text{AUDCOM} + \beta_5 \text{CONC} + \\ & \beta_6 \text{MANOS} + \beta_7 \text{FOROS} + \beta_8 \text{GOVOS} + \beta_9 \text{PUBOS} + \beta_{10} \text{TA} + \beta_{11} \text{ROA} + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3.13)$$

Keterangan:

- CSDI : indeks pengungkapan CSR
- BDSIZE : ukuran dewan komisaris
- BIND : komisaris independen
- WOB : proporsi wanita dalam dewan komisaris
- AUDCOM : ukuran komite audit
- CONC : konsentrasi kepemilikan

MANOS	: kepemilikan manajerial
FOROS	: kepemilikan asing
GOVOS	: kepemilikan pemerintah
PUBOS	: kepemilikan publik
SIZE	: proksi ukuran perusahaan, $\ln$ total aset
ROA	: proksi profitabilitas, ROA
$\varepsilon_i$	: error item

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas terhadap model tersebut.

#### **3.5.4 Pengujian Hipotesis**

Pada dasarnya ada 2 jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik.

Menurut Ghozali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal.
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama.
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik F.

#### **3.5.4.1 Uji F (*F test*)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui fit atau tidaknya model regresi yang digunakan. Pengujian ini juga bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % , maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi  $F < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya model regresi yang digunakan sudah fit dan terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi  $F > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya model regresi yang digunakan tidak fit dan ketujuh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai Adjusted  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.5.4.3 Uji Regresi Parsial (Uji t)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5 % , maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi  $t < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi  $t > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.